Manfaat Sosial Ekonomi Energi Terbarukan: Kasus Negara-negara ASEAN

Syaifuddin Yana^{1*}, Ardhana Yulisma², T.M. Zulfikar³

¹Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Serambi Mekkah

²Program Studi Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Ubudiyah Indonesia

³Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Serambi Mekkah

*Koresponden email: syaifuddin.yana@serambimekkah.ac.id

Diterima: 7 November 2021

Disetujui: 24 Desember 2021

Abstract

The development of renewable energy sources continues in the ASEAN region to meet the ASEAN energy mix target of 23% in 2025 and 31% in 2050. This is to meet the region's estimated 50% increase in energy demand. Renewable energy development projects in the ASEAN region have a beneficial effect on the ASEAN community's social life. This research is a review of the literature, examining journals on the socioeconomic benefits of NRE development through the lens of ASEAN member countries. Several conclusions can be drawn from the analysis's findings, including the following: (1) this renewable energy project can alleviate poverty by involving community members in utilizing natural resources to build power plants; (2) the creation of new jobs; (3) gross domestic product (GDP) is projected to increase by 2.5 percent in 2050; (4) the establishment of gender equality for women in the use of energy for regional development; and (5) an increase in education and scholastic achievement. The ASEAN region

Keywords: *The ASEAN countries, socioeconomic development, renewable energy, poverty alleviation, job creation, and gender equality*

Abstrak

Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di kawasan ASEAN terus dilakukan untuk mencapai target bauran energi ASEAN sebesar 23% pada Tahun 2025 dan 31% pada Tahun 2050. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan energi di kawasan ini yang diperkirakan akan tumbuh sebesar 50%. Proyek pengembangan energi terbarukan di kawasan ASEAN memberi dampak yang positif bagi kehidupan sosial masyarakat ASEAN. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan menelaah jurnal-jurnal terkait dengan manfaat sosial-ekonomi dari pengembangan EBT dengan mengambil kasus di negara-negara anggota ASEAN. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu (1) proyek energi terbarukan ini dapat meringankan masalah kemiskinan dengan peran serta masyarakat dalam memanfaatkan potensi alam untuk membangun pembangkit listrik, (2) terciptanya lapangan kerja baru, (3) produk domestik bruto (PDB) ditaksir akan meningkat sebesar 2.5% pada Tahun 2050, (4) terciptanya kesetaraan gender bagi perempuan dalam pemanfaatan energi untuk pembangunan wilayah, (5) terjadinya peningkatan pendidikan dan ketrampilan di masyarakat, (6) dan manfaat lainnya yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang baik di kawasan ASEAN.

Kata Kunci: *Negara-negara ASEAN, sosial ekonomi, energi terbarukan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan kesetaraan gender*

1. Pendahuluan

Energi terdahulu yang ada di muka bumi didominasi oleh pembangkit listrik konvensional yang bersumber dari energi fosil (batu bara, lignit, gas dan minyak) atau nuklir. Hal ini terlihat dari proyek-proyek skala besar dengan perencanaan yang substansial, namun belum memenuhi standar keamanan seperti pembangkit listrik tenaga nuklir. Dewasa ini, pembangunan pembangkit listrik dan proyek-proyek berskala kecil bertransisi dengan memanfaatkan energi terbarukan. Upaya ini dilakukan sebagai respon cepat terhadap permintaan energi yang terus meningkat di banyak negara. Energi terbarukan hadir sebagai sistem multi-manfaat yang menggabungkan kebutuhan ekologis seperti mitigasi perubahan iklim dengan visi masyarakat dan peluang ekonomi [1].

Peralihan ke energi terbarukan memberi banyak dampak positif seperti mengurangi subsidi dan kerugian akibat perubahan iklim, serta manfaat di bidang kesehatan. Laporan IRENA menyatakan bahwa setiap \$1 yang diinvestasikan untuk mengubah sistem energi global ke energi terbarukan akan memberi keuntungan sebesar \$3-\$7, tergantung dari faktor eksternal yang digunakan. Peningkatan penggunaan

energi terbarukan terbukti penting dalam mencapai target perubahan iklim pada Tahun 2050. Peralihan ke energi terbarukan juga akan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih banyak untuk menggantikan sektor industri bahan bakar fosil. Dukungan kebijakan dapat mendorong terciptanya manfaat sosial dan ekonomi dari transformasi ke energi bersih [2].

Asia Tenggara merupakan wilayah yang sangat beragam dan dinamis. Namun negara-negara di dalam kawasan tersebut memiliki satu elemen yang sama yaitu para pembuat kebijakan di berbagai negara telah mengintensifkan upaya mereka untuk memastikan jalur yang aman, terjangkau, dan lebih berkelanjutan untuk sektor energi. Hal tersebut dilakukan untuk memfasilitasi investasi dalam pasokan bahan bakar dan listrik serta infrastruktur. Potensi manfaat dari perluasan sistem energi kawasan yang dikelola dengan baik dapat mendorong peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat [3]. Saat ini energi terbarukan telah menyumbang lebih dari 50% kapasitas listrik terpasang. Namun untuk mencapai manfaat secara keseluruhan, maka bauran energi terbarukan (termasuk untuk pembangkit, pemanas, dan transportasi) harus ditingkatkan sebanyak enam kali lipat. Berdasarkan analisis IRENA, emisi CO₂ dalam bidang energi harus turun 70% pada 2050, dibanding level saat ini untuk bisa mencapai target [3].

Peralihan ke listrik berenergi terbarukan dalam skala besar bisa membantu pencapaian 60% dari target pengurangan tersebut. Jika didukung dengan penggunaan energi terbarukan untuk sistem pemanas dan transportasi, aksi ini bisa menyumbang 75% target pengurangan emisi. Ditambah aksi efisiensi energi, 90% dari target pengurangan emisi akan bisa dipenuhi. Listrik – bukan bahan bakar fosil seperti bensin dan solar – harus meningkat dari 25% saat ini menjadi lebih dari 50% pada 2050. Saat listrik menjadi sumber energi utama, pasokan energi total bisa naik berlipat ganda. Energi terbarukan, terutama angin dan matahari, mampu memasok 86% dari kebutuhan energi listrik masyarakat.

Laporan IRENA juga menggarisbawahi, melalui peralihan ke energi terbarukan, produk domestik bruto (PDB) dunia akan naik 2,5% dan total lapangan kerja naik 0,2% pada 2050. Manfaat ekonomi, kesehatan, serta lingkungan, menjadi alasan yang kuat bagi dunia untuk memilih energi terbarukan [4]. Konsumsi energi di Asia Tenggara hampir dua kali lipat antara 1995 dan 2015, tumbuh pada kecepatan rata-rata 3,4% setiap tahun. Hal tersebut telah memicu pertumbuhan ekonomi dan memungkinkan standar hidup yang lebih tinggi. Selama dekade terakhir, pertumbuhan tercepat ditunjukkan oleh Brunei Darussalam, Kamboja, dan Vietnam. Sementara pada 2015, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam menyumbang sebagian besar konsumsi energi final total (TFEC) di kawasan ini. Tahun itu, sektor industri, transportasi, dan perumahan menyumbang porsi yang hampir sama dari konsumsi energi di seluruh wilayah, meskipun perbedaan muncul di tingkat sub-regional [5].

Bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan gas alam telah menyumbang lebih dari setengah pasokan energi di kawasan ASEAN. Minyak mentah dan turunannya sebagian besar digunakan di sektor transportasi, dimana permintaan bahan bakar telah tumbuh dengan cepat. Sementara pangsa gas alam dalam total pasokan energi primer (TPES) telah meningkat pesat selama dua dekade terakhir, pertumbuhan tercepat terjadi pada batubara, terutama dengan commissioning berbagai pembangkit listrik tenaga batubara sejak Tahun 2000. Gas alam berkontribusi bagian terbesar (41%) untuk campuran pembangkit listrik pada Tahun 2015, diikuti oleh batubara (33%), dan tenaga air (16%). Sejalan dengan ekspansi ekonomi yang cepat dan berkelanjutan di kawasan ASEAN, permintaan energi diperkirakan akan tumbuh rata-rata 4,7% per tahun pada periode hingga 2035. Pertumbuhan permintaan energi tertinggi yaitu pada sektor pembangkit tenaga listrik, sektor industri, transportasi, dan infrastruktur [5]. Meningkatnya kebutuhan energi dan perubahan dinamika permintaan-penawaran menciptakan tantangan baru dan berat bagi para pembuat kebijakan di Asia Tenggara. Meskipun ada peluang yang diciptakan oleh kebijakan yang tepat, beberapa tantangan membutuhkan pendekatan di seluruh wilayah. Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin membahas tentang manfaat sosial-ekonomi dari pengembangan energi-terbarukan dengan mengambil studi kasus di kawasan negara-negara ASEAN.

2. Metode Penelitian

Penelitian merupakan penelitian studi literatur dengan menelaah jurnal terkait dengan upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, upaya ASEAN dalam pengentasan kemiskinan, efek pemanfaatan energi terbarukan terhadap penciptaan lapangan pekerjaan, kesetaraan gender, peningkatan pendidikan dan keterampilan, serta pertumbuhan inklusif dan pemberdayaan masyarakat. Hasil dari berbagai telaah literatur ini akan digunakan untuk mengetahui manfaat sosial-ekonomi dari energi terbarukan di kawasan negara ASEAN.

3. Tinjauan Pustaka

3.1. Pengurangan ketergantungan bahan bakar dan peningkatan keterjangkauan energi

Sejak revolusi industri, konsumsi bahan bakar fosil telah meningkat secara sistematis di seluruh dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, kenaikan permintaan energi di negara-negara Asia Tenggara lebih tinggi daripada kebanyakan negara maju karena peningkatan populasi dan ekonomi yang begitu cepat [6]. Ekspansi penggunaan energi seperti itu menyebabkan peningkatan konsumsi bahan bakar fosil dan emisi polutan yang mengakibatkan masalah kualitas udara dan kesehatan manusia di kawasan ini [7] [8]. Dalam penelitian sebelumnya, aerosol pembakaran bahan bakar fosil bertanggung jawab atas terjadinya 82% dari hari visibilitas rendah (visibilitas <10 km), sedangkan aerosol pembakaran biomassa hanya berkontribusi terhadap 18% dari hari visibilitas rendah di Asia Tenggara [9]. Dengan demikian hasil menunjukkan bahwa pentingnya mengurangi emisi bahan bakar fosil untuk meningkatkan kualitas udara di Asia Tenggara.

Tingkat kesadaran masyarakat umum dan pemerintah secara global tentang perubahan iklim dan masalah yang terkait terus meningkat, hal ini menghasilkan komitmen sebagian besar negara untuk mengurangi emisi mereka ke tingkat tertentu (Perjanjian Paris). ASEAN juga telah menunjukkan keinginan kuat untuk bekerja sama dalam masalah energi, serta mengatasi masalah lingkungan. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat sebesar 5% dari 2000 hingga 2013 dan perkiraan peningkatan populasi dari 525 juta pada 2000 menjadi 728 juta pada 2030, negara-negara Asia Tenggara harus menghadapi tantangan untuk meningkatkan konsumsi energi mereka tanpa meningkatkan emisi. Namun, menurut Badan Energi Internasional (IEA), dengan kebijakan saat ini di kawasan tersebut mengenai konsumsi bahan bakar, permintaan energi negara-negara Asia Tenggara harus dipenuhi terutama bahan bakar fosil, khususnya batu bara, yang kemungkinan akan menjadi bahan bakar fosil utama dalam bauran energi kawasan pada Tahun 2040. Oleh karena itu, negara-negara ASEAN akan membutuhkan perubahan dalam kebijakan energi mereka agar konsisten dengan komitmen lingkungan mereka [10].

Dalam penelitian terbaru, ref. [11] menggunakan data pengiriman Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) Tahun 2015 untuk menyelidiki emisi global dari pengiriman. Studi mereka menunjukkan bahwa Singapura memiliki kepadatan emisi pengiriman tertinggi di dunia. Selain itu, emisi PM_{2.5} dan SO_x tertinggi per unit terjadi di Laut Cina Selatan dan Timur serta di perairan yang dekat dengan Asia Tenggara dan Asia Selatan. Nitrogen oksida yang dipancarkan oleh kapal (NO_x) juga meningkatkan produksi ozon (O₃), yang menyebabkan efek buruk pada kesehatan manusia dan produksi pertanian. Muncul kekhawatiran tentang dampak polutan dari kapal terhadap kualitas udara pada banyak daerah pesisir karena regulasi polusi udara dalam transportasi laut di kawasan ASEAN masih belum jelas.

Faktanya, dampak dari praktik konsumsi bahan bakar tersebut terhadap kualitas udara tidak pernah dianalisis secara kuantitatif, kemungkinan karena kompleksitas yang membutuhkan penggunaan model cuaca dan kimia-kimia atmosfer yang didukung oleh emisi dan data pengukuran. Banyak penelitian dilakukan untuk memeriksa hasil kualitas udara di Asia Tenggara dalam dua tahun terakhir dengan dukungan data yang memadai, sebagai hasil dari lima skenario hipotesis yang berbeda dari konsumsi bahan bakar di sektor pembangkit listrik, industri, dan perumahan. Dengan mengeksplorasi model cuaca regional dan kimia-kimia tingkat tinggi untuk menyimulasikan konsentrasi atmosfer dari polutan atmosfer, termasuk bahan partikulat dan menguji efek dari kebijakan mitigasi emisi yang ideal dalam mengubah level atmosfer dari beberapa polutan udara utama [12].

Negara-negara anggota ASEAN juga berkontribusi besar terhadap peningkatan konsumsi bahan bakar di sektor transportasi karena lonjakan urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, yang mengakibatkan meningkatnya permintaan akan mobilitas. Berdasarkan perkiraan skenario pertumbuhan, tingkat motorisasi ASEAN (jumlah kendaraan per seribu orang) akan terus lebih besar dari India dan Cina selama dua dekade berikutnya. Peningkatan subsidi bahan bakar menghambat kemampuan pemerintah untuk mendanai program-program lain, termasuk yang diarahkan untuk memperbaiki kehidupan orang miskin. Konsumen yang mendapat manfaat dari subsidi ini biasanya kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Di Indonesia, misalnya, sebanyak 40% keluarga berpenghasilan tinggi mendapat manfaat dari 70% subsidi bahan bakar, sementara 40% keluarga berpenghasilan rendah hanya mendapat manfaat dari 15% subsidi [13]. Filipina dan Thailand telah menderegulasi pasar untuk bensin dan solar dan oleh karena itu hanya subsidi yang ditargetkan untuk transportasi publik yang disediakan.

International Energy Agency (IEA) merupakan sebuah organisasi antar pemerintah yang bekerja untuk memastikan energi yang dapat diandalkan, terjangkau, dan bersih untuk para anggotanya. IEA juga mendefinisikan keamanan energi sebagai ketersediaan sumber energi yang tidak terputus dengan harga yang terjangkau. Kepedulian terhadap kawasan ini bukan tentang keterjangkauan bagi konsumennya tetapi juga bagi pemerintah mereka. Dengan meningkatnya permintaan energi, permintaan minyak diperkirakan tumbuh dari 4,7 juta barel per hari menjadi sekitar 6,6 juta barel. Asia Tenggara dulu dikenal dengan ladang

minyak yang kaya, namun sumber daya ini sekarang cenderung menipis dengan cepat. Selain Brunei dan Thailand, produsen minyak terbesar di kawasan ini yaitu Malaysia, Indonesia, dan Vietnam juga mengalami kesulitan untuk mengimbangi laju pertumbuhan permintaan minyak di wilayah tersebut. Negara-negara tersebut saat ini telah menjadi importir minyak mentah daripada eksportir. Diperkirakan bahwa impor minyak mentah akan lebih dari dua kali lipat di wilayah ini pada Tahun 2040.

Dengan konsumsi dan subsidi minyak yang tinggi, kebijakan dan langkah-langkah ekonomi bahan bakar dapat berkontribusi pada upaya pemerintah dalam konservasi energi dan meliberalisasi harga bahan bakar, sehingga memungkinkan lebih banyak investasi di sektor-sektor utama lainnya, seperti pendidikan, dan kesehatan. Harga minyak mentah global terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan harga yang stabil ini memiliki implikasi negatif terhadap ekonomi ASEAN dan telah menjadi pendorong peningkatan subsidi bahan bakar yang signifikan.

Meningkatnya kebutuhan energi dan perubahan dinamika permintaan dan penawaran menciptakan tantangan berat bagi pembuat kebijakan di Asia Tenggara, tetapi transisi energi juga membuka kebijakan baru yang terjangkau dan opsi teknologi. Teknologi hemat energi dan rendah karbon menawarkan cara untuk mengejar berbagai tujuan ketahanan energi, keterjangkauan, dan tujuan lingkungan. Biaya tenaga angin dan tenaga surya yang menurun dengan cepat memberikan peluang untuk membantu memenuhi permintaan listrik yang meningkat dengan cara yang hemat biaya dan berkelanjutan, juga membantu memacu industri manufaktur lokal. Malaysia merupakan produsen sel fotovoltaik terbesar ketiga di dunia, sementara industri manufaktur tenaga surya Thailand meningkatkan output PV untuk pasar global [13].

Diperkirakan wilayah tersebut akan mengonsumsi lebih banyak minyak dan gas alam secara signifikan untuk memenuhi permintaan energi yang terus meningkat. Dengan menipisnya cadangan domestik, secara bertahap ketergantungan pada bahan bakar fosil ini meningkatkan kekhawatiran keamanan energi untuk kawasan ini. Setelah bertahun-tahun menjadi pengeksportir bersih bahan bakar fosil, ASEAN terus menjadi pengimpor bersih bahan bakar fosil. Ketergantungan impor ini akan menempatkan beban fiskal yang meningkat pada negara-negara anggota [14].

Pembangunan manusia tidak hanya membutuhkan lebih banyak energi untuk setiap negara, tetapi juga meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan bagi seluruh populasi. Listrik bukan hanya sebuah kemewahan, tetapi input penting untuk peningkatan mata pencaharian, termasuk standar hidup, kesehatan, dan pendidikan. Namun, setidaknya 50 juta orang di ASEAN tidak memiliki akses listrik karena jumlah pasokan yang diterima tidak setara dengan jumlah jiwa. Sedangkan, sebanyak 200 juta lainnya mengandalkan biomassa tradisional untuk memasak, sebuah praktik yang berbahaya bagi kesehatan dan boros tenaga kerja, dalam pengumpulan bahan bakar [14].

3.2. Peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan

Wilayah ASEAN telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat selama 2 dekade terakhir dan pertumbuhannya telah mengangkat ratusan juta orang keluar dari kemiskinan. Permintaan energi telah tumbuh 2,5 kali sejak Tahun 1990 dan diperkirakan akan menjadi tiga kali lipat pada Tahun 2035. Namun, sekitar 130 juta orang di ASEAN masih kekurangan akses listrik, sehingga belum bisa menikmati fasilitas kesehatan, sosial, dan ekonomi [15]. Seperti yang dinyatakan oleh Komunitas ASEAN di akhir Tahun 2015, kurangnya akses listrik dan energi dapat mengancam pertumbuhan ekonomi dan transisi ekonomi kawasan tersebut. Menurut ref. [16] pada Tahun 2018, perkiraan total PDB semua negara ASEAN berjumlah sekitar 2,95 triliun dolar AS, peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya. Faktanya, PDB wilayah ASEAN telah meroket selama beberapa tahun terakhir seperti yang terlihat pada **Gambar 1**.

Gambar 1. Produk domestik bruto negara-negara ASEAN dari tahun 2008 – 2018
(dalam miliar dolar AS)
Sumber: (2019)

Dalam skenario kebijakan, permintaan energi secara keseluruhan di Asia Tenggara tumbuh sebesar 60% hingga 2040. Perekonomian kawasan ASEAN mengalami pertumbuhan lebih dari dua kali lipat selama periode ini dan meningkat dari 120 juta populasi yang terkonsentrasi di daerah perkotaan. Tingkat proyeksi pertumbuhan permintaan energi lebih rendah pada dua dekade terakhir, hal tersebut mencerminkan pergeseran ekonomi struktural ke sektor manufaktur dan jasa yang kurang intensif energi, serta efisiensi yang lebih besar. Meskipun demikian, masih mewakili sekitar 12% dari proyeksi peningkatan penggunaan energi global hingga 2040 [10].

Semua bahan bakar dan teknologi berperan dalam memenuhi pertumbuhan permintaan dalam skenario. Permintaan minyak Asia Tenggara melampaui 9 juta barel per hari (mb/d) pada Tahun 2040, naik diatas 6,5 mb / hari. Minyak terus mendominasi permintaan transportasi jalan, meskipun ada peningkatan konsumsi biofuel. Elektrifikasi mobilitas, dengan pengecualian sebagian roda dua dan tiga, hanya membuat terobosan terbatas. Jalur ini menunjukkan sedikit perubahan di Asia Tenggara dari kemacetan yang terjadi di jalan dan kualitas udara perkotaan yang buruk [10].

Para Menteri ASEAN untuk Pembangunan Pedesaan dan Pemberantasan Kemiskinan (AMRDPE) telah menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia melalui investasi yang lebih besar dalam pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pembelajaran seumur hidup untuk mempromosikan kemampuan kerja dan keamanan finansial kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan harus didasarkan pada prinsip kemandirian melalui pengembangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan kapasitas untuk pemerintah daerah dan mobilisasi sumber daya di tingkat lokal. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan lingkungan yang kondusif untuk memfasilitasi kegiatan yang menghasilkan pendapatan, memberikan kesempatan kerja, dan meningkatkan akses pasar ekonomi pedesaan kecil. Dibutuhkan peranan sektor swasta dan hubungan sinergis dengan komite ASEAN yang terkait dalam menangani bidang kesehatan, pertanian, tenaga kerja, perempuan, dan kesejahteraan sosial [17].

Tabel 1. Rencana aksi kerangka kerja ASEAN tentang Pembangunan Pedesaan dan Pengentasan Kemiskinan 2016-2020

Program/Proyek/Aktivitas	Jadwal Pelaksanaan	Koordinator Negara	Potensi Mitra
RDPE Komponen 1: Pertumbuhan Ekonomi Pedesaan			
Dokumentasikan dan berbagi praktik dan tantangan yang baik, serta peningkatan kapasitas dalam Pembangunan Berbasis Desa/Komunitas (V/CDD)	2017-2018	Thailand Indonesia	Bank Dunia ADB Australia
Promosi One Tambon One Product (OTOP) untuk kalangan muda	2018	Thailand	Badan sektoral terkait di bawah AEC

Berturut-turut: Berbagi praktik terbaik di antara AMS melalui tur studi manajemen rantai nilai			SOM-AMAF SOMY
Forum daerah pengelolaan sumber daya desa untuk pembangunan perdesaan dan penanggulangan kemiskinan	2017-2018	Indonesia	Asia DHRRA
RDPE Komponen 2: Perlindungan Sosial dan Jaring Pengaman			
Bekerja untuk membangun jaringan regional lembaga kredit mikro/keuangan mikro dan bank petani. [dilaksanakan dari FAP 2011-2015 sebelumnya] Sub- proyek: Melakukan studi tentang mekanisme keuangan dan asuransi berbasis masyarakat yang layak	2016-2020	Laos Filipina	Bank Sentral Laos PDR
Forum Regional tentang Kemajuan Perlindungan Sosial: Berbagi praktik dan strategi yang baik di antara Negara-negara Anggota ASEAN untuk mengadvokasi peningkatan Sumber Daya Keuangan Nasional untuk Perlindungan Sosial	2017	Thailand	SOMSWD Yayasan ASEAN
Program Regional ASEAN untuk Pengembangan Kapasitas untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Program Perlindungan Sosial melalui <i>Community Driven Development</i> [dilaksanakan dari FAP 2011-2015 sebelumnya]	2016	Filipina	JAIF
Kajian Regional Ketahanan Pangan dan Lonjakan Harga: Inventarisasi Kebijakan Perlindungan Sosial Responsif bagi Masyarakat Miskin yang Rentan [dilaksanakan dari FAP 2011-2015 sebelumnya]	2016	Filipina	JAIF
Mendukung implementasi Kerangka Kerja Regional dan Rencana Aksi untuk Melaksanakan Deklarasi ASEAN tentang Penguatan Perlindungan Sosial pada proyek- proyek yang terkait dengan SOMRDPE	2016-2020	SOMRDPE	Badan-badan sektoral ASEAN terkait
RDPE Komponen 3: Pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah pedesaan dan daerah pinggiran kota			
Kajian prioritas utama untuk mempersempit kesenjangan pembangunan dalam konteks pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan	2016-2020	Kamboja	JAIF
Forum untuk berbagi praktik dan pengetahuan terbaik, diskusi kebijakan; pelatihan; dan kunjungan pertukaran yang bertujuan untuk mempromosikan sektor informal, UKM, kewirausahaan, skema kredit mikro, ekuitas mikro, skema alternatif untuk keuangan mikro dan pinjaman pertanian, reformasi aset	2017	Malaysia	Badan sektoral terkait di bawah AEC SOMSWD SOMY Asia DHRRA

[dilaksanakan dari FAP 2011-2015
sebelumnya]

Kunjungan studi/beasiswa bagi
perencana pembangunan angkutan
umum yang efisien sebagai solusi
perumahan bagi masyarakat miskin
perkotaan

Source: [18]

Tingkat kemiskinan di kawasan ASEAN menunjukkan tren menurun. Menurut Bank Dunia ukuran kemiskinan yaitu sebesar 1,25\$ USD atau 2\$ USD paritas daya beli (PPP). Menurut definisi garis kemiskinan nasional, Filipina berada pada tingkat kemiskinan tertinggi di kawasan ASEAN. Sedangkan Vietnam merupakan negara yang berhasil dalam menurunkan tingkat kemiskinan, menurut ukuran standar 1,25\$ dan 2\$ (PPP), sementara Thailand telah memimpin tren jika dibandingkan dengan garis kemiskinan nasional [19]. Ketimpangan pendapatan di kawasan ASEAN cenderung menurun. Indonesia, Laos, dan Malaysia adalah negara yang mengalami peningkatan ketimpangan pendapatan dan konsumsi. Sementara itu, Kamboja, Filipina, Thailand, dan Vietnam berhasil mengurangi ketimpangan pendapatan. Kamboja memimpin tren regional dalam mengurangi ketimpangan yang diukur dengan Koefisien Gini [19].

Mengatasi kemiskinan merupakan hal yang sulit untuk diselesaikan. Namun beberapa elemen-elemen yang dapat diterapkan untuk mengurangi kemiskinan, yaitu mempromosikan tata kelola yang baik dan kerja sama di tingkat lokal dan tingkat nasional, pemberdayaan terhadap orang miskin, menargetkan pengeluaran untuk orang miskin, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, meningkatkan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat miskin, menciptakan sistem koordinasi yang lebih baik, mengurangi ketimpangan pendapatan, memantau pengembangan masyarakat dan meningkatkan pengumpulan data dan analisis, serta mengurangi kerentanan terhadap bencana alam. Urutan dan prioritas elemen-elemen ini tentu akan bervariasi di seluruh AMS yang berkembang seiring pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan. Bagi AMS yang menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang sedang berlangsung, seperti Laos dan Filipina, menciptakan infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat miskin dan mengelola permasalahan rumah tangga yang berada di garis kemiskinan adalah elemen penting yang perlu diprioritaskan untuk mengurangi kemiskinan dan kerentanan. Sedangkan untuk AMS lainnya, terutama Singapura, banyak dari elemen kritis pembangunan sosial-ekonomi ini telah diatasi dan fokus dapat digeser untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan meningkatkan peluang untuk pertumbuhan berkelanjutan [19].

3.3. Penciptaan lapangan kerja

Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) telah menganalisis manfaat sosial-ekonomi dari energi terbarukan sejak Tahun 2011. Fokus awal adalah pada penciptaan lapangan kerja dan keterampilan, kemudian diperluas mencakup aspek-aspek seperti produk domestik bruto (PDB), kesejahteraan, penciptaan nilai ekonomi lokal, peningkatan mata pencaharian, gender dan manfaat lainnya. Penilaian meliputi dampak global saat ini, regional dan terpilih, serta proyeksi hingga 2030 dan 2050 [20]. Peralihan energi fosil ke energi terbarukan sebenarnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat ASEAN. Menurut ref. [20] energi terbarukan memiliki dampak pada penciptaan lapangan kerja. Misalnya, energi yang diciptakan melalui sel fotovoltaik surya, gas *landfill*, atau pabrik biomassa memiliki jumlah pekerjaan yang lebih tinggi per unit energi yang dihasilkan daripada energi yang dihasilkan melalui sumber konvensional.

Gambar 2. Pekerjaan yang akan dipindahkan di bawah skenario teknologi baru berdasarkan negara (2018-2028)

Sumber: [21]

Teknologi dapat mengusir sekitar 28 juta pekerja di kawasan ASEAN pada Tahun 2028, tetapi dengan meningkatkan pendapatan nyata akan menghasilkan tuntutan baru bagi pekerja juga. Pekerjaan akan terus berevolusi, sehingga memberikan tantangan besar bagi pekerja ASEAN. Teknologi yang didukung oleh Inteligensi Buatan akan memberikan peningkatan produktivitas yang substansial di semua sektor ekonomi ASEAN selama dekade berikutnya, menghasilkan manfaat besar bagi bisnis dan kesejahteraan bagi kawasan ini. Namun, hal tersebut berdampak signifikan pada pasar tenaga kerja karena teknologi akan membutuhkan banyak keterampilan dan profil pekerjaan yang lebih mumpuni [21].

Beberapa tahun terakhir terjadi perubahan besar pada negara-negara Asia, dimana pekerjaan energi terbarukan global naik dari 50% pada 2013 menjadi 62% pada 2016. Perkembangan energi terbarukan yang sangat pesat di kawasan tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu kebijakan penyebaran yang kuat telah menyebabkan munculnya pasar domestik yang dinamis, dan kebijakan industri telah mendukung pertumbuhan fasilitas manufaktur yang bersaing secara global, terutama di industri solar fotovoltaik (PV). Cina tetap menjadi perusahaan tunggal terbesar dengan 3,6 juta pekerjaan energi terbarukan. Di India, penyebaran rekor kapasitas tenaga surya dan angin telah didorong oleh instrumen kebijakan nasional dan negara. Pembuatan panel fotovoltaik (PV) dan modul surya juga lepas landas di negara-negara Asia Tenggara, seperti Malaysia. Sementara Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina, telah menambah pekerjaan di sektor biofuel [20].

Tabel 2. Kemiskinan ekstrem dan relatif di negara-negara Asia Tenggara

Negara	Garis kemiskinan internasional (1.90\$ USD PPP per hari)		Garis kemiskinan kelas menengah ke bawah (3.20\$ USD PPP per hari)		Garis kemiskinan kelas menengah atas (5.50\$ USD PPP per hari)	
	Share of pop (%)	Jutaan orang	Share of pop (%)	Jutaan orang	Share of pop (%)	Jutaan orang
Indonesia (2016)	6.8	17.8	31.4	82.1	62.8	163.9
Filipina (2015)	8.3	8.5	33.7	34.3	64.2	65.3
Myanmar (2015)	6.5	3.4	30.2	15.8	67.9	35.6
Vietnam(2014)	2.8	2.5	11.6	10.5	36.3	32.9
Thailand (2013)	0	0	1.1	0.7	11.6	7.9
Lao PDR (2012)	22.7	1.5	58.5	3.8	85	5.5
Malaysia (2009)	0.3	0.1	3.1	0.9	13.6	3.8
Total	n.a.	33.8	n.a.	148.1	n.a.	314.9

Sumber: [35]

Pekerjaan sangat penting untuk menghasilkan upah dan dengan demikian untuk kesejahteraan individu dan keluarga, penciptaan, dan retensi pekerjaan adalah sangat penting dalam setiap ukuran pembangunan sosial-ekonomi. Penghasilan upah dan gaji terutama dari pekerjaan bergaji besar

memungkinkan orang untuk melakukan pembelian yang menghasilkan permintaan barang dan jasa yang stabil, berkontribusi pada ekonomi lokal dan nasional yang sehat. Ukuran pekerjaan dengan demikian jauh melampaui pekerjaan langsung di sektor energi terbarukan dan pekerjaan tidak langsung dalam rantai pasokan, juga mencakup apa yang disebut pekerjaan terinduksi dalam ekonomi yang lebih luas [22][23][24].

4. Manfaat Sosial

4.1 Kesetaraan gender

AMS telah berupaya untuk mendorong kesetaraan gender dalam pekerjaan melalui langkah-langkah kebijakan seperti yang ada di Brunei, Malaysia, dan Myanmar. Misalnya, pemerintah Brunei telah memperkenalkan undang-undang, kebijakan, dan peraturan baru untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam pekerjaan dalam lima tahun terakhir seperti: Ketenagakerjaan 2009, untuk menggantikan UU Ketenagakerjaan sebelumnya, yang berupaya melindungi perempuan di tempat kerja dengan menyediakan tunjangan kehamilan untuk ibu hamil; Keselamatan dan Kesehatan Kerja Tempat Kerja 2009; Peraturan Cuti Bersalin 2011 yang menetapkan 105 hari cuti hamil dibayar untuk semua karyawan wanita. Untuk pegawai negeri sipil wanita, ini merupakan peningkatan dari cuti hamil yang dibayar 56 hari sebelumnya. Dalam dinas sipil, peraturan telah diubah sehubungan dengan masa kerja untuk personel perempuan yang belum menikah yang lulus dari bulan ke bulan menjadi basis permanen, berdasarkan istilah yang sama dengan wanita pascasarjana maupun pria. Hal ini memastikan keamanan kerja bagi perempuan dan hak mereka atas berbagai upah dan tunjangan dalam layanan sipil seperti tunjangan cuti dan tunjangan pendidikan [25]. Dari 46.600 pegawai negeri sipil di Brunei Darussalam, 23.400 adalah perempuan dan 23.200 adalah laki-laki. Selisih perbedaan antara pria dengan wanita yaitu hanya 200 pegawai [26].

Asosiasi Hak-Hak Wanita Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan pemberdayaan politik wanita tidak menjadi perhatian utama ASEAN pada awal tahunnya. Karena pada saat didirikan fokus utama ASEAN adalah stabilitas dan keamanan. Kerangka kebijakan pendiri ASEAN, Perjanjian Amity, kerjasama di Asia Tenggara, dan deklarasi ASEAN ditulis tanpa kepekaan khusus terhadap gender. Seiring waktu, tujuan ASEAN telah diperluas untuk mencakup pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial di samping stabilitas regional dan resolusi konflik (ASEAN 2008). Komunitas ASEAN didirikan pada tahun 2008. Tiga pilar utama Komunitas ASEAN, yaitu Komunitas Politik-Keamanan ASEAN (APSC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASCC). Setiap pilar telah mendedikasikan *blueprint* yang menguraikan langkah-langkah dan tindakan yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk mempercepat pembangunan dan membangun perdamaian dan keamanan politik dan sosial di wilayah tersebut [26].

Dalam wilayah ASEAN, kesetaraan gender dan isu-isu perempuan saat ini berada di bawah lingkup ASCC yang diadakan dua kali setahun. Fungsi utamanya adalah untuk memastikan implementasi keputusan yang relevan dari KTT ASEAN; mengoordinasikan pekerjaan berbagai sektor dibidangnya dan pada isu-isu yang melintasi dewan komunitas lainnya; dan menyerahkan laporan dan rekomendasi kepada KTT ASEAN tentang hal-hal dibidangnya [27]. Karena itu ASCC adalah badan utama yang bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan gender di ASEAN.

Badan gender terpenting kedua di ASEAN adalah Komite ASEAN untuk Perempuan (ASW), yang dibentuk pada Tahun 1976. Awalnya Sub-Komite ASEAN untuk Perempuan (ASW), namanya diganti dengan Program Perempuan ASEAN pada tahun 1981 dan Komite ASEAN tentang perempuan pada Tahun 2002. Ini adalah badan utama yang mengoordinasi dan memantau kegiatan ASEAN dan memfasilitasi kerja sama dalam isu-isu perempuan. Ini terdiri dari mesin gender dari negara-negara anggota ASEAN, dan khususnya para menteri nasional dan perwakilan pemerintah, yang bertemu setiap tahun. Misi pertama ASW adalah memantau dan mengevaluasi implementasi Deklarasi ASEAN tentang kemajuan perempuan. ASW menerbitkan laporan status setiap tiga tahun, yang menganalisis keadaan partisipasi perempuan di bidang politik serta seberapa baik perhatian perempuan dimasukkan ke dalam rencana dan program nasional. Ia juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi, memantau, dan mengevaluasi implementasi instrumen internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Deklarasi Beijing serta Platform Aksi. Akhirnya, ACW bertanggung jawab untuk berkolaborasi dengan dan membangun kapasitas pemerintah nasional, mengembangkan kebijakan, bertukar praktik terbaik dan mengatur kunjungan studi.

Terdapat hambatan serius terhadap akses perempuan dalam pekerjaan, upah, aset, dan perlindungan sosial. Hasil ekonomi pada partisipasi perempuan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja lebih rendah daripada laki-laki. Data menunjukkan bahwa di hampir semua negara ASEAN, perempuan cenderung menemukan pekerjaan dengan keterampilan rendah, maka tidak heran jika terjadi kesenjangan upah gender secara terus-menerus. Ini juga berlaku di negara-negara anggota berpendapatan

tinggi, seperti Singapura dan Brunei Darussalam, dimana sebagian besar pekerjaan klerikal dan dasar ditempati oleh perempuan. Jika perempuan tidak dipekerjakan dalam pekerjaan dengan keterampilan tinggi dan gaji tinggi, maka ruang gerak mereka untuk meningkatkan penghasilan cenderung sedikit. Mayoritas perempuan, di sebagian besar negara anggota ASEAN dipekerjakan dalam pekerjaan yang rentan dengan akses terbatas ke tunjangan dan perlindungan sosial [28].

Diskriminasi kelembagaan di negara-negara tertentu mencegah perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi. Norma-norma sosial di negara-negara tertentu sangat patriarki dan bertindak sebagai penghalang bagi partisipasi perempuan dan akses ekonomi. Pencapaian pendidikan, khususnya pendidikan tinggi dan pelatihan keterampilan adalah kunci untuk perempuan mengakses peluang kerja yang lebih baik dan lebih dibayar. Data pencapaian pendidikan menunjukkan bahwa perempuan cenderung menghabiskan lebih sedikit tahun di sekolah daripada pria, kecuali di Brunei Darussalam, Myanmar, dan Filipina di mana kesenjangan gender dalam pencapaian pendidikan sekarang nol. Persentase wanita dengan pendidikan tinggi lebih tinggi daripada pria di enam dari sepuluh negara anggota ASEAN, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Singapura. Namun, tingkat partisipasi angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan yang berbeda menunjukkan bahwa sebagian besar perempuan berpendidikan tinggi tetap menganggur. Ini menunjukkan bahwa ada faktor-faktor mendasar lainnya, selain perbedaan dalam sumber daya manusia, yang menjauhkan perempuan dari pekerjaan yang dibayar [28].

Hak-hak sosial perempuan di negara-negara Anggota ASEAN (AMS) telah meningkat secara signifikan dalam lima tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa ada akses yang lebih besar ke pendidikan, peningkatan harapan hidup, dan peningkatan angka kematian ibu (AKI). Akibatnya, Indeks Pembangunan Manusia (HDI) menunjukkan bahwa sebagian besar AMS berada dalam peringkat “sedan”, dengan pengecualian Singapura dan Brunei Darussalam, yang berada pada “tinggi”. Sementara, Singapura mengklaim bahwa para wanita di negaranya memiliki akses yang luas terhadap layanan kesehatan kelas dunia. Latar pendidikan yang tinggi, menyebabkan para wanita di Singapura memiliki kesempatan dan akses ke dunia kerja lebih besar [29]. Pelayanan masyarakat adalah pilar terpenting dalam Pemerintahan Singapura yang terkenal dengan sistem administrasinya yang bebas dari korupsi. Pada akhir 2014, terdapat 56,7% wanita yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, 26,1% sebagai sekretaris permanen, dan 28,1% sebagai wakil sekretaris. Sekretaris permanen adalah posisi tertinggi yang dipegang oleh pegawai negeri sipil dalam Kementerian Pemerintah, diikuti oleh posisi wakil sekretaris. Perempuan menduduki 24 dari 101 kursi (23,8%) di Parlemen Singapura per Juni 2016 naik 22 dari 94 kursi (23,4%) pada 2009. Persentase ini melebihi rata-rata dunia *Inter-Parliamentary Union* di dunia yaitu 22,6% [30]. Pada Januari 2016 dan 18,8 % [30] pada 2009. Pada 2013, Mdm Halimah Yacob diangkat sebagai Ketua Parlemen wanita pertama di Singapura hingga Juni 2016, ada enam perempuan pemegang jabatan politik. Dari lima walikota di Singapura, dua adalah wanita.

4.2 Peningkatan pendidikan dan keterampilan

Paritas gender dalam pendidikan di AMS hampir tercapai kecuali untuk Kamboja, Laos, dan Myanmar (CLM). Paritas gender dalam kemampuan membaca dan menulis dan tingkat penyelesaian primer mencapai kesetaraan. Tetapi tingkat kemampuan membaca dan menulis orang dewasa dan tingkat kemampuan membaca dan menulis wanita relatif rendah. Di sisi lain, perlu dicatat bahwa di Singapura, tingkat kemampuan membaca dan menulis perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Namun, negara-negara CLMV perlu meningkatkan tingkat penyelesaian sekunder mereka sehingga siswa dapat transisi ke peluang kejuruan, teknis, dan universitas [31].

Kelompok ASEAN secara keseluruhan mengalami kemajuan dalam hal pendidikan. Hampir semua anak menyelesaikan pendidikan dasar di Malaysia, Indonesia, Singapura, Vietnam, dan Brunei Darussalam. Hal ini terlihat dari tingkat melek huruf dan berhitung yang tinggi, dan peringkat teratas diduduki oleh Vietnam dan Singapura dalam hal penilaian kompetensi siswa internasional. Beberapa kelompok tertentu, terutama anak-anak dari latar belakang sosial ekonomi rendah, masih tetap dirugikan, terutama di tingkat pendidikan pasca-sekolah dasar. Tetapi anak perempuan dan perempuan memiliki akses yang sama ke pendidikan dibandingkan dengan anak laki-laki dan laki-laki di sebagian besar negara; tingkat melek huruf perempuan juga tinggi.

Gambar 3. Tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai
(% lulusan dalam populasi keseluruhan di ASEAN)
Sumber: [32]

Vietnam telah menghapuskan ketidaksetaraan gender dalam pendidikan di semua tingkatan [33]. Demikian juga, Filipina telah sepenuhnya menutup kesenjangan gender dalam pendidikan dengan lebih banyak perempuan daripada laki-laki di tingkat dasar, menengah, dan tersier. Ini adalah satu-satunya negara di Asia yang telah menutup kesenjangan gender dalam hal pendidikan dan kesehatan pada Tahun 2014 dan merupakan satu-satunya dari delapan negara di dunia yang melakukannya [34]. Namun, ada ruang untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam pendidikan menengah dan tinggi di AMS, terutama di negara-negara dengan tingkat partisipasi kurang dari 50%.

Skenario perdagangan yang diproyeksikan di ASEAN dan dampaknya terhadap lapangan kerja pada Tahun 2025 telah dibuat oleh ILO dan ADB. Meskipun belum diketahui secara jelas skenario mana yang akan berlaku dan sangat mungkin jika negara-negara AEC akan mengalihkan proporsi mereka saat ini dari tenaga kerja berketerampilan rendah dan menengah ke tenaga kerja dengan keterampilan lebih tinggi, karena mereka menerapkan Kerangka Referensi Kualifikasi ASEAN dan dengan demikian meningkatkan transparansi dan kinerja sistem pendidikan dan pelatihan mereka untuk menanggapi kebutuhan keterampilan yang muncul. Pergeseran ASEAN menuju industri bernilai tambah lebih tinggi menuntut keunggulan akademis dalam sains, teknologi, teknik, dan matematika, dan membina jalur karier yang beragam untuk wanita dan pria. Pekerja perlu dilengkapi dengan keterampilan untuk pekerjaan saat ini dan masa depan dan memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan persyaratan teknologi yang berubah cepat. Sistem pendidikan dan pelatihan perlu meningkatkan akses dan kualitas. Keterampilan kejuruan juga harus dipromosikan, khususnya yang relevan dengan sektor yang cepat berkembang [35].

4.3 Pertumbuhan inklusif dan pemberdayaan masyarakat

Pada bulan Desember 1997, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) mulai membayangkan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi dengan pembangunan ekonomi yang adil, dan mengurangi tingkat kemiskinan dan sosial ekonomi hingga 2020. Pada Oktober 2003, Negara anggota ASEAN setuju untuk membentuk Komunitas ASEAN pada Tahun 2020, dengan tiga pilar komunitas keamanan politik, komunitas ekonomi, dan komunitas sosial budaya [36]. Kemudian, pada bulan Agustus 2006, para Menteri Ekonomi ASEAN pada prinsipnya setuju untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Tahun 2015, sebagai tujuan menengah dari visinya untuk Tahun 2020.

Diantara pilar utama MEA adalah membangun ASEAN yang kompetitif, inklusif, dan tangguh. Dengan langkah besar, negara-negara anggota ASEAN (AMS) tentu memiliki pekerjaan yang cukup besar untuk dilakukan. Masih ada tantangan dan hambatan pembangunan dalam masing-masing negara dan kawasan secara keseluruhan, namun yang paling mendesak diantaranya terletak pada apakah negara anggota yang kurang berkembang bisa mengejar ketinggalan dengan yang lebih maju. Namun, kemajuan ASEAN sejauh ini, khususnya sebagai blok tunggal ketika bernegosiasi dan menerapkan perjanjian perdagangan bebas dengan yang lain mitra dagang utama, membawa harapan besar untuk realisasi AEC. Asosiasi ini juga berfokus pada proses pembangunan komunitasnya, khususnya mengenai kapasitas negara-negara anggotanya untuk melengkapi realisasi MEA. Terlepas dari upayanya membangun AEC, ASEAN juga menaruh perhatian yang semakin besar pada pilar-pilar lain dari komunitas ASEAN, terutama pilar

sosial-budaya. Pada saat pelaksanaan KTT di Singapura Tanggal 20 November 2007, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mengembangkan *blueprint* untuk memastikan bahwa tindakan nyata dilakukan untuk membangun ASEAN Komunitas Sosial Budaya (ASCC). Sebagai tujuan utamanya, ASCC melayani dan berkontribusi untuk mewujudkan Komunitas ASEAN yang berpusat pada manusia dan sosial, serta bertanggung jawab dengan tujuan untuk mencapai solidaritas dan persatuan yang abadi antara bangsa-bangsa dan masyarakat ASEAN dengan membentuk identitas bersama dan membangun kepedulian dengan cara berbagi bersama masyarakat yang inklusif dan harmonis, serta mata pencaharian dan kesejahteraan rakyat ditingkatkan. Deklarasi Nay Pyi Taw dari ASEAN para pemimpin pada Tanggal 25 November 2014 menguraikan bahwa ASCC bersifat inklusif, berkelanjutan, ulet, dinamis, dan memberi manfaat bagi rakyat [37].

Visi ASEAN setelah Tahun 2015 yaitu berfokus pada pembangunan pedesaan, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan inklusif yang berbasis pada ekonomi pedesaan yang terdiversifikasi dan tahan iklim, memperkerjakan tenaga kerja pedesaan, demokrasi pedesaan dan dekonsentrasi, peningkatan infrastruktur pedesaan, peningkatan materi kondisi kehidupan di daerah pedesaan, hubungan pedesaan-perkotaan yang memadai, dan memastikan perlindungan sosial dan pengurangan substansial dari kemiskinan kronis [38].

5. Kesimpulan

Pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di kawasan ASEAN sejalan dengan meningkatnya permintaan energi di dalam kawasan ini. Ditaksir akan terjadi peningkatan populasi dari 525 juta pada Tahun 2000 menjadi 728 juta pada 2030, dimana negara-negara Asia Tenggara harus menghadapi tantangan untuk meningkatkan konsumsi energi mereka tanpa meningkatkan emisi. Peralihan dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) mencapai target bauran energi ASEAN sebesar 23% pada Tahun 2025 dan 31% pada Tahun 2050. Proyek energi terbarukan ini terus dikembangkan sebagai energi alternatif pengganti energi fosil yang ketersediaannya di alam mulai menipis dan juga untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) di lingkungan. Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) ini memberi dampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat ASEAN, khususnya di sektor sosial ekonomi.

Hasil analisis manfaat sosial-ekonomi energi baru terbarukan (EBT) bagi masyarakat di kawasan ASEAN, yaitu (1) pengembangan energi terbarukan ini mampu meringankan masalah kemiskinan di masyarakat, seperti daerah-daerah terpencil yang belum teraliri listrik dapat mengembangkan potensi alam di daerahnya untuk membangun pembangkit listrik. Melalui pengembangan sistem ketenagalistrikan berbasis (EBT), sejatinya telah membantu negara-negara di ASEAN dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan pemerataan ekonomi. (2) Pengembangan energi terbarukan juga dapat menciptakan lapangan kerja baru yang bermanfaat bagi masyarakat, (3) Produk Domestik Bruto (PDB) ditaksir akan meningkat sebesar 2.5% pada Tahun 2050, (4) sektor energi umumnya didominasi oleh satu gender tertentu (pria) karena banyak pekerjaan di sektor energi yang melibatkan pekerjaan fisik maupun perhitungan teknis. Namun pengembangan energi terbarukan mampu mengubah perspektif di masyarakat, dimana energi memberi makna berbeda untuk perempuan. Misalnya dengan adanya listrik, bukan hanya mendapat penerangan, namun dengan penerangan tersebut perempuan dapat melakukan kegiatan yang bernilai ekonomi, sehingga kesetaraan gender dapat bersinergi dalam pembangunan desa. (5) Manfaat lainnya seperti peningkatan pendidikan dan keterampilan dll.

6. Referensi

- [1] O. Edenhofer, R. Pichs-Madruga, Y. Sokona, K. Seyboth, P. Matschoss, S. Kadner, T. Zwickel, P. Eickemeier, G. Hansen, S. Schlömer, and C. von Stechow, *Summary for Policymakers*, In: IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press, 2011.
- [2] IRENA, *Global Energy Transformation: A Roadmap to 2050 (2019 Edition)*, Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency, 2019.
- [3] International Energy Agency (IEA), *The Critical Role of Buildings Perspectives for the Clean Energy Transition*, 2019.
- [4] IRENA, *Transforming the Energy System – and Holding the Line on the Rise of Global Temperatures*, Abu Dhabi: International Renewable Energy Agency, 2019.
- [5] IRENA, *Renewable Energy Market Analysis: Southeast Asia*. Abu Dhabi: IRENA, 2018.
- [6] International Energy Agency (IEA), *Southeast Asia Energy Outlook*, Paris: World Energy Outlook Special Report, 2015.

- [7] E. Frankenberg, D. McKee, and D. Thomas, "Health consequences of forest fires in Indonesia," *Demography*, Vol. 42, No. 1, pp. 109-129, 2005.
- [8] M. H. Forouzanfar, L. Alexander, H. R. Anderson, V. F. Bachman, S. Biryukov, M. Brauer, R. Burnett, D. Casey, M. M. Coates, A. Cohen et al., "Global, regional, and national comparative risk assessment of 79 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks in 188 countries, 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013," *The Lancet*, Vol. 386, pp. 2287–2323, 2015.
- [9] H. H. Lee, O. Iraqui, Y. Gu, S. Hung-Lam Yim, A. Chulakadabba, A. Yiu-Ming Tonks, Z. Yang, and Chien Wang, "Impacts of air pollutants from fire and non-fire emissions on the regional air quality in Southeast Asia," *Atmos. Chem. Phys.*, Vol. 18, pp. 6141–6156, 2018. <https://doi.org/10.5194/acp-18-6141-2018>
- [10] IEA, *Southeast Asia Energy Outlook 2019*, Paris: IEA, 2019. Diakses pada Tanggal 21 Desember di <https://www.iea.org/reports/southeast-asia-energy-outlook-2019>
- [11] L. Johansson, J-P. Jalkanen, and J. Kukkonen, "Global assessment of shipping emissions in 2015 on a high spatial and temporal resolution," *Atmospheric Environment*, Vol. 167, pp. 403–415, 2017. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2017.08.042>.
- [12] H-H Lee, O. Iraqui, and C. Wang, "The impact of future fuel consumption on regional air quality in Southeast Asia," *Scientific Reports*, Vol. 9, No. 2648, 2019.
- [13] The International Energy Agency (IEA), *Southeast Asia Energy Outlook*, 2017.
- [14] P. A-Speed and H. V. Singh, How to power a bright future for ASEAN, World economic forum, 2018, Diakses pada Tanggal 19 Desember 2020 pada <https://www.weforum.org/agenda/2018/09/developing-a-shared-vision-for-aseans-energy-transition/>
- [15] S. Wajjwalku, K. C. Ho, and O. Yoshida, *Advancing the Regional Commons in the New East Asia*, London and New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2016.
- [16] H. Plecher, Gross domestic product of the ASEAN countries from 2008 to 2018, 2019, Diakses pada Tanggal 11 Februari 2020 di <https://www.statista.com/statistics/796245/gdp-of-the-asean-countries/>
- [17] The ASEAN Secretariat, *ASEAN Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication (2011-2015)*, Jakarta: Association of Southeast Asian Nations, 2012.
- [18] The ASEAN Secretariat, *ASEAN Framework Action Plan on Rural Development and Poverty Eradication 2016-2020*, Jakarta: Association of Southeast Asian Nations, 2017.
- [19] S. Sumarto and S. Moselle, *Addressing Poverty and Vulnerability in ASEAN: an Analysis of Measures and Implications Going Forward*, ERIA Discussion Paper Series, 2015.
- [20] International Renewable Energy Agency (IRENA), *Renewable Energy Benefits: Understanding the Socio-Economics*, 2017.
- [21] Oxford Economics, *Technology and The Future of Asean Jobs: The impact of AI on workers in ASEAN's six largest economies*, CISCO, 2018.
- [22] IRENA, *Renewable Energy Market Analysis: The GCC Region*. Abu Dhabi: IRENA, 2016a.
- [23] IRENA, *Renewable Energy Market Analysis: Latin America*. Abu Dhabi: IRENA, 2016.
- [24] IRENA, *Renewable Energy Market Analysis: Southeast Asia*. Abu Dhabi: IRENA, 2018a.
- [25] UNESCAP, *National Review of 20-Year Implementation of the Beijing Platform for Action (BPFA) in Vietnam and the Outcomes of the 23rd Special Session of the General Assembly*, 2014.
- [26] UNDP, *Regional Organizations, Gender Equality and the Political Empowerment of Women*, International IDEA, 2017.
- [27] ASEAN, *the ASEAN Charter*, Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008.
- [28] The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), *Projected Gender Impact of the ASEAN Economic Community*. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2016.
- [29] T. Liang-lin, Five gender gaps Singapore women still face in 2015, *The Straits Times*, 2015. Diakses pada Tanggal 21 Desember 2021 pada <https://www.straitstimes.com/opinion/five-gender-gaps-singapore-women-still-face-in-2015>
- [30] Inter-Parliamentary Union (IPU), *Women in Parliament in 2015: the year in review*, 2015.
- [31] M. Aring, *ASEAN Economic Community 2015: enhancing competitiveness and employability through skill development*, Bangkok: ILO, 2015.
- [32] World Economic Forum, *Human Capital Outlook: Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, 2016.
- [33] Atradius, 2nd February 2015, *Country Report Vietnam*, Diakses pada 21 Desember 2021 di <https://group.atradius.com/publications/country-report-vietnam-2015.html>

-
- [34] World Economic Forum, 21 August 2014, Global Competitiveness Report 2014-2015, Diakses Pada Tanggal 21 Desember 2021 di <https://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2014-2015>
 - [35] ADB and ILO, *ASEAN Community 2015: Managing Integration for Better Jobs and Shared Prosperity*. Thailand: ILO and ADB, 2014.
 - [36] ASEAN, *Asean Economic Community Blueprint*, Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008.
 - [37] ASEAN, *ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint 2025*. Jakarta, ASEAN Secretariat, 2016.
 - [38] V. T. Thanh and N. A. Duong, "Promoting Rural Development, Employment, and Inclusive Growth in ASEAN. Promoting Rural Development, Employment, and Inclusive Growth in ASEAN," *ERIA Discussion Paper Series*, 2016.